

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM
ISU SOSIAL LINGKUNGAN
(STUDI KASUS ISU SOSIAL LINGKUNGAN DI INDONESIA TIMUR)**



**RIA ANJELINA TANAN
1910321050**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM ISU SOSIAL LINGKUNGAN (STUDI KASUS ISU SOSIAL LINGKUNGAN DI INDONESIA TIMUR)



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Pada program studi S1 Akuntansi

**RIA ANJELINA TANAN
1910321050**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM
ISU SOSIAL LINGKUNGAN:
(STUDI KASUS ISU SOSIAL LINGKUNGAN DI INDONESIA TIMUR)**

Disusun dan Diajukan

RIA ANJELINA TANAN

1910321050

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 09 Maret 2024

Pembimbing



Dr. Habib Muhammad Shahib.,SE.,M.,Si.,Ak.,CA.,ACPA.,CSRS.,CSRA.,CLI
NIDN:093009910

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,ACPA
NIDN: 0925107801

HALAMAN PENGUJI

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM ISU SOSIAL LINGKUNGAN (STUDI KASUS ISU SOSIAL LINGKUNGAN DI INDONESIA TIMUR)

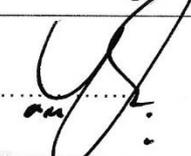
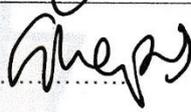
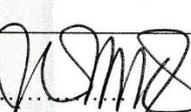
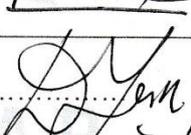
Disusun dan diajukan oleh

RIA ANJELINA TANAN
1910321050

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **09 Maret 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Habib Muhammad Shahib, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,ACPA.,CSRS.,CSRA.,CLI NIDN : 0930099101	Ketua	1..... 
2.	Siprianus Palete, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CERA.,CMA NIDN : 0922097303	Anggota	2..... 
3.	Wawan Darmawan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,ACPA NIDN : 0904118302	Anggota	3..... 
4.	Andi Dian Novita, S.ST.,M.Si. NIDN : 0909118801	Eksternal	4..... 

**Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu – Ilmu Sosial
Universitas Fajar**



Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN: 0925096902

**Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu – Ilmu Sosial
Universitas Fajar**



Yasmi, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,ACPA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Anjelina Tanan
NIM : 1910321050
Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Isu Sosial Lingkungan (Studi Kasus Isu Sosial Lingkungan Di Indonesia Timur)” adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Ria Anjelina Tanan

PRAKATA

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian program Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial jurusan Akuntansi konsentrasi Akuntansi Manajemen.

Terima kasih pula penulis sampaikan kepada kedua orangtua dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang, dukungan semangat dan doa yang tiada hentinya untuk keberhasilan penulis.

Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Habib Muhammad Sahib.,SE.,M.,Si.,Ak.,CA.,ACPA.,CSRS.,CSRA.,CLI selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas bimbingannya sehingga Skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Fajar Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Ibu Dr.Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom.
3. Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Fajar Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA.
4. Seluruh Dosen serta Staff Universitas Fajar.
5. Kepada kedua orang tua tercinta Samuel Paseru dan Martha Minggu yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan finansial dan saran hingga saat ini.
6. Kepada kakak dan adik Sepril, Marsel, Welly, Yunita, Tia Yang Telah Menjadi Support Sistem.

7. Buat Teman-teman seperjuanganku kelas 2 Akuntansi 2019 terima kasih untuk kekompakan dan selalu saling menyemangati dalam hal apapun dan juga kebersamaannya dari awal masuk kuliah hingga tahap skripsi ini.
8. Untuk Keluarga Bangladesh Salsa, Jessy, Bella, Gita, Pauline yang telag memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama melakukan penyusunan skripsi.
9. Untuk sahabat terbaikku Resky Natalia yang selalu ada menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.

Dalam penulisan laporan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dalam segi penulisan dan sebagainya, maka dari itu penulis sangat menerima dan mengharapkan saran serta kritik yang dapat membangun sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu.

Makassar, Maret 2024
Penulis

Ria Anjelina Tanan

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM ISU SOSIAL LINGKUNGAN (STUDI KASUS ISU SOSIAL LINGKUNGAN DI INDONESIA TIMUR)

**Ria Anjelina Tanan
Wawan Habib Muhammad Shahib**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu ingin membandingkan laporan EJAtlas khususnya mengenai isu sosial lingkungan di wilayah se- Indonesia Timur dengan LPPD/LAKIP pemerintah daerah di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan Teknik Observasi dan Dokumentasi. Pendekatan dari penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Maka populasi dari penelitian ini adalah website resmi pemerintah kota dan pemerintah kabupaten bagian Indonesia Timur.

Sampel dari penelitian ini adalah 8 website resmi pemerintah kota dan 23 website resmi pemerintah kabupaten bagian Indonesia Timur. Pada gambar dibawah ini yang termasuk dalam bagian Indonesia Timur yaitu pada sisi gambar yang berwarna lebih terang. Dimana meliputi daerah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua.

Upaya untuk mengamati praktik akuntabilitas dalam mengungkapkan isu lingkungan hidup melalui website resmi pemerintah daerah dengan menerapkan metode konten analisis berbasis acuan dengan mendownload data dari website pemerintah daerah 8 provinsi dan 23 kabupaten/kota pada kawasan Indonesia Timur yang juga menjadi fokus gerakan NGO sosial lingkungan yang ditampilkan dalam EJAtlas.

Kata kunci : Isu Lingkungan Sosial, EJAtlas

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF INTERNAL REGIONAL GOVERNMENT SOCIAL ENVIRONMENTAL ISSUES (CASE STUDY OF SOCIAL ENVIRONMENTAL ISSUES IN EASTERN INDONESIA)

**Ria Anjelina Tanan
Wawan Habib Muhammad Shahib**

Based on the background and problem formulation, the aim of this research is to compare the EJAtlas report, especially regarding social and environmental issues in regions throughout Eastern Indonesia with the LPPD/LAKIP of regional governments in the region.

This research uses observation and documentation techniques. The approach of this research is quantitative descriptive. So the population of this research is the official website of the city government and district government of Eastern Indonesia.

The samples from this research were 8 official city government websites and 23 official district government websites in Eastern Indonesia. In the image below, it is part of Eastern Indonesia that is on the lighter colored side of the image. Which includes the areas of Sulawesi, Nusa Tenggara Islands, Maluku Islands and Papua.

Efforts to observe accountability practices in disclosing environmental issues through official regional government websites by applying reference-based content analysis methods by downloading data from regional government websites in 8 provinces and 23 districts/cities in Eastern Indonesia which are also the focus of the social environmental NGO movement displayed in EJAtlas.

Keywords: Social Enviromental Issue, EJAtlas

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
H ALAMAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Akuntansi Sosial Lingkungan: Kajian Dalam Berbagai Prespektif.....	8
2.2 Pengungkapan (<i>Disclosure</i>) Sebagai Bidang Kajian Akuntansi Sosial	9
2.3 Isu-isu Akuntabilitas Lingkungan Hidup.....	10
2.4 Akuntabilitas Pemerintah Daerah.....	12
2.5 NGO (<i>Non Governmental Organisation</i>) Sebagai Pengawal Pembangunan Di Masyarakat	15
2.6 Gerakan NGO Dalam mengawal isu sosial lingkungan hidup : belajar dari EJAtlas.....	17
2.7 Penelitian Terdahulu	19
2.8 Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Rancangan Penelitian	21
3.2 Lokasi Penelitian.....	23
3.3 Populasi dan Sampel	23

3.3.2 Populasi	23
3.3.3 Sampel.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	24
3.4.1 Observasi.....	24
3.4.2 Dokumentasi	25
3.5 Tahapan Penelitian	25
3.5.1 Tahap Pra-penelitian	25
3.5.2 Tahap Proses Penelitian	25
3.5.3 Tahap Analisis Data	25
3.5.4 Tahap Pelaporan.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Gambaran Objek Penelitian.....	27
BAB V PENUTUP	33
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta EJAtlas	17
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Riset.....	20
Gambar 3.1 Peta Bagian Indonesia Timur.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4. 1	Daftar Provinsi Di Indonesia Timur Yang Memiliki Isu Sosial Lingkungan	28
Tabel 4. 2	Daftar Kabupaten Di Indonesia Timur Yang Memiliki Isu Sosial Lingkungan Berdasarkan Ejatlas	29
Tabel 4. 3	Tingkat Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Website	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang saat ini banyak mengalami isu sosial lingkungan. Permasalahan sosial lingkungan sudah mencuri perhatian dunia sejak tahun 1970-an (Mayank & Amit, 2013). Ginting dan Ekawati (2016), berpendapat bahwa kebanyakan masalah lingkungan sosial sekarang ini disebabkan oleh kegiatan sosial ekonomi manusia dan memburuknya lingkungan akibat kegiatan itu berpengaruh terhadap bumi secara keseluruhan baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Masalah lingkungan adalah masalah yang bersifat alamiah, yaitu peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses alam. Dalam konteks isu sosial lingkungan, LPPD mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memelihara, menjaga, dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup di daerahnya. Latar belakang pentingnya isu sosial lingkungan dalam LPPD adalah semakin meningkatnya kesadaran akan perlunya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di seluruh dunia. Dampak negatif, penurunan kualitas udara, kekeringan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati semakin nyata dan berdampak pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil tindakan yang responsif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah lingkungan di daerahnya.

Dalam era digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi, pemerintah semakin memanfaatkan website resmi sebagai media komunikasi dan penyedia informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk isu-isu lingkungan hidup. Dalam hal ini, Laporan Pelaksanaan

Pemerintah Daerah (LPPD) dapat diunggah dan diakses melalui situs web pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengkaji, mengevaluasi, dan memberikan input terkait upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup (Nuh, 2012). Lewat situs web pemerintah daerah, masyarakat dapat mengakses informasi terkait kebijakan, program, dan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Mereka juga dapat memperoleh data dan statistik terkait indikator lingkungan hidup, seperti kualitas udara, air, dan tanah, serta upaya penanggulangan perubahan iklim.

Dengan adanya laporan di situs web pemerintah daerah ini, masyarakat dapat mengetahui secara transparan dan akurat bagaimana komitmen pemerintah daerah terhadap upaya pelestarian lingkungan. Masyarakat juga dapat memberikan kritik, saran, atau pengaduan melalui fitur yang disediakan di website. Memanfaatkan situs web pemerintah daerah untuk menyediakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) terkait isu lingkungan memungkinkan penyebaran informasi yang lebih efisien, aksesibilitas yang lebih luas, dan partisipasi publik yang lebih besar. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah. Dengan demikian pemerintah daerah khususnya pada kawasan Indonesia Timur memiliki situs web resmi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari dan mengakses informasi publik sesuai dengan yang masyarakat butuhkan. Namun dalam beberapa situs web pemerintah terdapat beberapa menu yang tidak dapat menampilkan informasi yang dibutuhkan seperti LPPD/LAKIP.

Isu sosial lingkungan di Indonesia sangat penting untuk dibahas mengingat masalah lingkungan yang semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Permasalahan sosial lingkungan hidup merupakan masalah alami, yang merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Akan tetapi, saat ini masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang terjadi secara alami, karena manusia juga menjadi faktor penyebab yang sangat signifikan terhadap kerusakan lingkungan (Herlina, 2015). Awatara, (2011), menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini bersumber dari kesalahan perilaku manusia terhadap cara pandang dan kesalahan eksplorasi sumber daya alam. Masalah lingkungan hidup yang terjadi dapat dikatakan sebagai masalah moral, yang berhubungan dengan perilaku manusia yang akan menentukan baik buruknya kondisi suatu lingkungan (Palupi, 2017). Kebiasaan perilaku atau tindakan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan lingkungan hidup (Laurens, 2012).

Beberapa isu permasalahan sosial dan lingkungan yang dihadapi pemerintah khususnya dibagian Indonesia Timur yaitu, penebangan liar, penambangan ilegal, pencemaran laut, konflik perkebunan, kerusakan hutan, konflik pembebasan lahan serta permasalahan pembangunan infrastruktur (Zulfa, 2016). Dari permasalahan sosial dan lingkungan yang telah disebutkan ada beberapa dampak buruk yang terjadi jika permasalahan tersebut dibiarkan atau tetap berjalan yaitu hilangnya tanah pucuk, hilangnya mata pencaharian petani lokal, merusak habitat makhluk hidup baik yang didarat maupun dilaut, tanah longsor dan banjir (LBH, 2016 ;WALHI, 2015). Memanfaatkan situs web pemerintah daerah untuk menyediakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

terkait isu lingkungan memungkinkan penyebaran informasi yang lebih efisien, aksesibilitas yang lebih luas, dan partisipasi publik yang lebih besar. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah.

Menarik kemudian untuk dilihat, Indonesia sudah punya infrastuktur pelaporan akuntabilitas yang cukup lengkap namun, fenomena selanjutnya komunitas masyarakat yaitu *Civil Society Organization* (CSO) melihat bahwa meskipun pemerintah telah mengarah ke akuntabel tetapi menurut CSO akuntabilitas pemerintah masih kurang. Buktinya masih banyak permasalahan sosial lingkungan yang terjadi dan tidak jelas bagaimana pemerintah khususnya pemerintah daerah mengatasi masalah sosial lingkungan ini (Waters, 2015)

Isu tentang *Civil Society Organization* (CSO) atau komunitas masyarakat ingin mengkritisi pemerintah daerah dari segi akuntabilitas atau kinerjanya sudah banyak diteliti, misalnya penelitian yang dilakukan Shahib 2017 yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat laporan akuntabilitas pemerintah daerah, hasilnya pemerintah provinsi telah berfokus untuk menyampaikan akuntabilitas mereka kepada masyarakat melalui situs web resmi mereka . Kemudian penelitian Shahib (2022) yang meneliti tentang laporan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah diseluruh Indonesia , hasilnya menunjukkan kurangnya tingkat akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan re-focusing anggaran penanggulangan Covid-19. Namun demikian fokus penelitian tersebut masih berfokus langsung kepada menilai laporan pemerintah belum

membandingkan informasi yang diberikan oleh CSO (*Civil Society Organization*) dengan laporan pemerintah.

Berangkat dari cela riset tersebut, penelitian ini kemudian menawarkan sudut pandang alternatif atas kebaruan penelitian dengan mencoba menggabungkan dua celah tersebut yaitu celah dari fenomena bahwa bagaimana isu sosial lingkungan ini dipertanggung jawabkan dan dari celah riset bagaimana membandingkan akun-akun perlawanan (*Counter Account*) (Apostol, 2015). Salah satu akun perlawanan atau perjuangan yang menjadi acuan adalah EJAtlas karena EJAtlas merupakan sistem informasi dari semua NGO (*Non-Governmental Organization*) dari seluruh dunia untuk melaporkan permasalahan sosial lingkungannya (EJAtlas <https://ejatlas.org>)

Alasan mengapa peneliti memilih untuk mempelajari isu-isu sosial dan lingkungan di Indonesia bagian Timur yaitu yang pertama, tantangan lingkungan yang unik; Indonesia Timur merupakan rumah bagi beragam ekosistem. Lingkungan ini menghadapi berbagai ancaman, seperti deforestasi, pertambangan, dan perubahan iklim (Laily, 2022). Kedua, wilayah yang belum banyak diketahui dalam konteks riset akuntabilitas; dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia, Indonesia bagian timur relatif kurang mendapat perhatian dari para peneliti lainnya utamanya dalam konteks riset akuntabilitas pemerintahan sehingga membuka peluang untuk mengeksplor banyak isu sosial dan lingkungan. Dengan berfokus pada wilayah ini, peneliti dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar yang terkena dampak.

Pada akhirnya, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi: pertama, penelitian ini berkontribusi pada kemajuan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah, khususnya dalam konteks pelaporan pemerintah berbasis situs web pada pemerintah daerah di Indonesia. Kedua, penelitian ini memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi situs web untuk mengembangkan pola akuntabilitas dan transparansi. Ketiga, penelitian ini akan menambah pembahasan mengenai isu-isu sosial-lingkungan dan akuntansi dalam literatur penelitian pemerintahan yang sudah ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang diamati penulis terkait dengan rumusan masalah penelitian ini. Maka dari itu rumusan penelitian ini yaitu bagaimana pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur mempertanggungjawabkan isu sosial lingkungan di daerahnya melalui LPPD/LAKIP yang diunggah di website resmi pemerintah daerah sebagai respon ataskonsen publik luas yang dilaporkan melalui laporan Eجاتlas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu ingin membandingkan laporan Eجاتlas khususnya mengenai isu sosial lingkungan di wilayah se- Indonesia Timur dengan LPPD/LAKIP pemerintah daerah di wilayah tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikakan manfaat kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu akuntansi sosial dan lingkungan di lingkup pemerintahan seperti konflik lingkungan hidup, laporan keberlanjutan, dan hal-hal terkait lainnya yang hingga saat ini masih jarang ditemukan penelitiannya di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis terkait luasnya lingkup ilmu akuntansi terutama di lingkup akuntansi sosial lingkungan di pemerintah daerah

1.4.2.2 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya dengan fokus penelitian yang lebih luas.

1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan gaya akuntabilitas pada website resmi dalam mengungkapkan isu-isu sosial lingkungan kepada masyarakat.

1.4.2.4 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dan pembangunan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sosial Lingkungan: Kajian Dalam Berbagai Prespektif

Akuntansi sosial dikenal dengan berbagai istilah, karena tidak ditentukan dalam undang-undang, maka istilah menjadi tetap fleksibel. Akuntansi sosial dipandang sebagai akuntansi sosial, publisitas sosial, pelaporan sosial, pelaporan sosial, akuntansi sosial dan/atau lingkungan dan/atau keberlanjutan, publisitas tanggungjawab sosial, lingkungan dan etika, dan sejumlah kombinasi dan istilah-istilah ini ditambah dengan sinonim lainnya. Pelaporan sosial adalah proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dan kegiatan ekonomi suatu organisasi kepada pemangku kepentingan tertentu dalam masyarakat pada umumnya. Dengan demikian hal ini dapat memperluas akuntabilitas organisasi, terutama dikalangan bisnis dan perusahaan dalam menyediakan layanan kepada nasabah, terutama bagi mereka yang memiliki saham. Ekspansi semacam itu didasarkan pada asumsi bahwa korporasi memiliki tanggung jawab lebih dari sekedar menghasilkan uang untuk pemegang sahamnya (Gray et al. 2014).

Menurut Gray et. al akuntansi sosial terdiri dari tiga hal sekaligus, yaitu:

1. Merupakan manifestasi yang relatif sederhana dari upaya korporasi untuk melegitimasi, menjelaskan dan membenarkan tindakan perusahaan
2. Merupakan bagian yang diinginkan secara etis dari demokrasi yang berfungsi dengan baik;
3. Merupakan salah satu dari sedikit mekanisme yang tersedia untuk menghadapi keberlanjutan yang tidak melibatkan fasisme

Menurut Rini (2022), pandangan fungsionalis akuntansi menekankan pada penjelasan pengaturan sosial (di sini akuntansi berperan) dari perspektif realisme, positivisme, determinisme dan nomothesis. Pandangan fungsional menyangkut aturan yang efektif berdasarkan bukti objektif. Hipotesis akuntansi fungsional menguji fenomena akuntansi sebagai fenomena diseluruh dunia yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman dan prediksi. Seperti fungsionalisme struktural, paradigma akuntansi fungsional berfokus pada penciptaan nilai akuntansi dan diperlukan untuk mengefisienkan operasi bisnis. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk beradaptasi mencapai tujuan, mengintegrasikan dan memperkuat pola atau situasi. Berdasarkan kondisi tersebut, struktur atau elemen akuntansi dapat mengalami perubahan atau perkembangan.

2.2 Pengungkapan (*Disclosure*) Sebagai Bidang Kajian Akuntansi Sosial

Menurut Riadi (2020) pengungkapan adalah penyajian informasi tentang perusahaan dalam bentuk laporan keuangan atau alat komunikasi lain yang mendukungnya. Pengungkapan wajib dapat memberikan informasi tambahan daripada menguranginya sebab cetakannya terlalu detail atau sulit buat dianalisis. *Sustainability report* atau laporan keberlanjutan menurut *Global Initiative Reporting* (2018) adalah “laporan tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi”. *Sustainability report* bisa disebut dengan berbagai istilah yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), laporan non-keuangan, laporan *triple bottom line*, dan sebagainya.

Sustainability report menurut GRI “diajukan oleh perusahaan dan organisasi dari semua jenis, ukuran dan sektor dari setiap sudut dunia”.

Terdapat dua jenis pengungkapan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan. Pelaporan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan dimaksud adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku, dalam hal ini aturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), namun sebelum adanya Keputusan Ketua Bapepam No. 38/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996, pengungkapan wajib tersebut adalah keseluruhan informasi yang dimuat di dalam laporan keuangan tahunan

2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah penyediaan informasi secara sukarela oleh perusahaan yang melampaui pengungkapan wajib (Nugraheni, 2012).

2.3 Isu-isu Akuntabilitas Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah hasil dari interaksi antara kondisi fisik, yang meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna didaratan dan dilaut, dengan kelembagaan yang mencakup aspek manusia, termasuk cara penggunaan lingkungan fisik (Juliana, 2016). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berbagai isu lingkungan mulai banyak dibicarakan mulai dari isu-isu berskala lokal seperti banjir tanah longsor, kekeringan, erosi dan sampah,

hingga isu-isu global seperti pemanasan global, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.

Pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dengan melibatkan setiap lapisan masyarakat dan pihak swasta dalam menjaga pembangunan yang berkelanjutan serta berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan tanggung jawab sosial kolektif yang berlaku secara kolektif. lingkungan hidup dapat memberikan tanggung jawab sosial kolektif yang berlaku bagi seluruh komponen yang terlibat dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Bagi seluruh komponen yang terlibat dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Beberapa isu strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dihadapi pemerintah khususnya di bagian Indonesia Timur antara lain:

1. Penebangan liar, penebangan hutan secara liar dapat merusak keseimbangan alam, keanekaragaman satwa dan hayati di hutan berkurang, sumber daya air berkurang yang mengakibatkan rusaknya sumber daya hutan yang berdampak pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat sekitar hutan (Wihadjo, 2021)
2. Penambangan ilegal, upaya penambangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki lisensi dan terkadang mengabaikan aspek keselamatan dan tidak ramah lingkungan (Sompotan, 2022)
3. Pencemaran laut, kondisi laut yang tercemar oleh manusia seperti minyak yang tumpah ke laut, pencemaran sampah organik di laut yang mengganggu ekosistem dan keindahan panorama laut (Negara, 2020)

4. Konversi lahan pertanian, banyak lahan produktif yang dikonversi menjadi kawasan industri, yang mempengaruhi produktivitas pangan di dalam negeri (Ayun, 2020)

Berbagai permasalahan yang menjadi isu strategis saat ini terkait tata kelola lingkungan hidup memerlukan tindak lanjut dari pemerintah baik melalui kebijakan maupun regulasi. maupun melalui program-program strategis yang secara efektif mampu mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dengan pendekatan, dengan melibatkan setiap komponen baik masyarakat maupun swasta untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup (Nahrudin, 2018).

2.4 Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Konsep akuntabilitas melekat dalam wacana akuntansi. Dapat dikatakan bahwa praktik akuntansi merupakan konsekuensi dari konsep akuntabilitas jika keduanya tidak memiliki korelasi yang kuat. Menurut OECD (2018), Akuntabilitas adalah prinsip utama dalam teori dan praktek manajemen kontemporer. Menurut Shahib (2021) bahwa saat ini, dasar historis dan filosofis dari konsep akuntabilitas dapat dipahami dalam wacana organisasi saat ini dan dalam praktiknya. Terutama ketika definisi akuntabilitas dikaitkan dengan lembaga pembuat kebijakan.

Menurut OECD (2018), Akuntabilitas merupakan konsep kunci dalam teori dan praktik manajemen modern. akuntabilitas merupakan kegiatan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai misi dan tujuan yang direncanakan dengan

pelaporan secara berkala melalui laporan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2010)

Akuntabilitas pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa "*Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.*".

Akuntabilitas terkait erat dengan sarana kegiatan administrasi, terutama yang berkaitan dengan pencapaian hasil pelayanan publik dan mengkomunikasikannya secara transparan kepada publik (Wilopo, 2017) . Oleh karena itu, akuntabilitas dapat diartikan secara sederhana sebagai langkah menuju akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas yaitu sebagai berikut: "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dengan menjelaskan kinerja dan perilaku individu/pemimpin organisasi kepada yang memiliki wewenang untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas penting untuk memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan, dan prediktabilitas. Pertanggungjawaban bersifat konkrit, tidak abstrak, dan harus ditentukan oleh undang-undang melalui prosedur yang sangat spesifik terkait dengan subjek pertanggungjawaban (Lestari & Sri, 2017)

Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik yang meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh didaratan dan dilautan, dengan kelembagaan yang

mencakup ciptaan manusia, termasuk seperti bagaimana menggunakan lingkungan fisik (Juliana, 2016). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berbagai isu lingkungan mulai banyak dibicarakan mulai dari isu-isu berskala lokal seperti banjir tanah longsor, kekeringan, erosi dan sampah, hingga isu-isu global seperti pemanasan global, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.

Pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dengan melibatkan setiap lapisan masyarakat dan pihak swasta dalam menjaga pembangunan yang berkelanjutan serta berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan tanggung jawab sosial kolektif yang berlaku secara kolektif. lingkungan hidup dapat memberikan tanggung jawab sosial kolektif yang berlaku bagi seluruh komponen yang terlibat dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Bagi seluruh komponen yang terlibat dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Beberapa isu strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dihadapi pemerintah khususnya di bagian Indonesia Timur antara lain:

1. Penebangan liar, penebangan hutan secara liar dapat merusak keseimbangan alam, keanekaragaman satwa dan hayati di hutan berkurang, sumber daya air berkurang yang mengakibatkan

rusaknya sumber daya hutan yang berdampak pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat sekitar hutan.

2. Penambangan Ilegal, upaya penambangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki lisensi dan terkadang mengabaikan aspek keselamatan dan tidak ramah lingkungan
3. Pencemaran laut, kondisi laut yang tercemar oleh manusia seperti minyak yang tumpah ke laut, pencemaran sampah organik di laut yang mengganggu ekosistem dan keindahan panorama laut.
4. Konversi lahan pertanian, banyak lahan produktif yang dikonversi menjadi kawasan industri, yang mempengaruhi produktivitas pangan di dalam negeri.

Berbagai permasalahan yang menjadi isu strategis saat ini terkait tata kelola lingkungan hidup memerlukan tindak lanjut dari pemerintah baik melalui kebijakan maupun regulasi. maupun melalui program-program strategis yang secara efektif mampu mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dengan pendekatan, dengan melibatkan setiap komponen baik masyarakat maupun swasta untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup (Nahrudin, 2018).

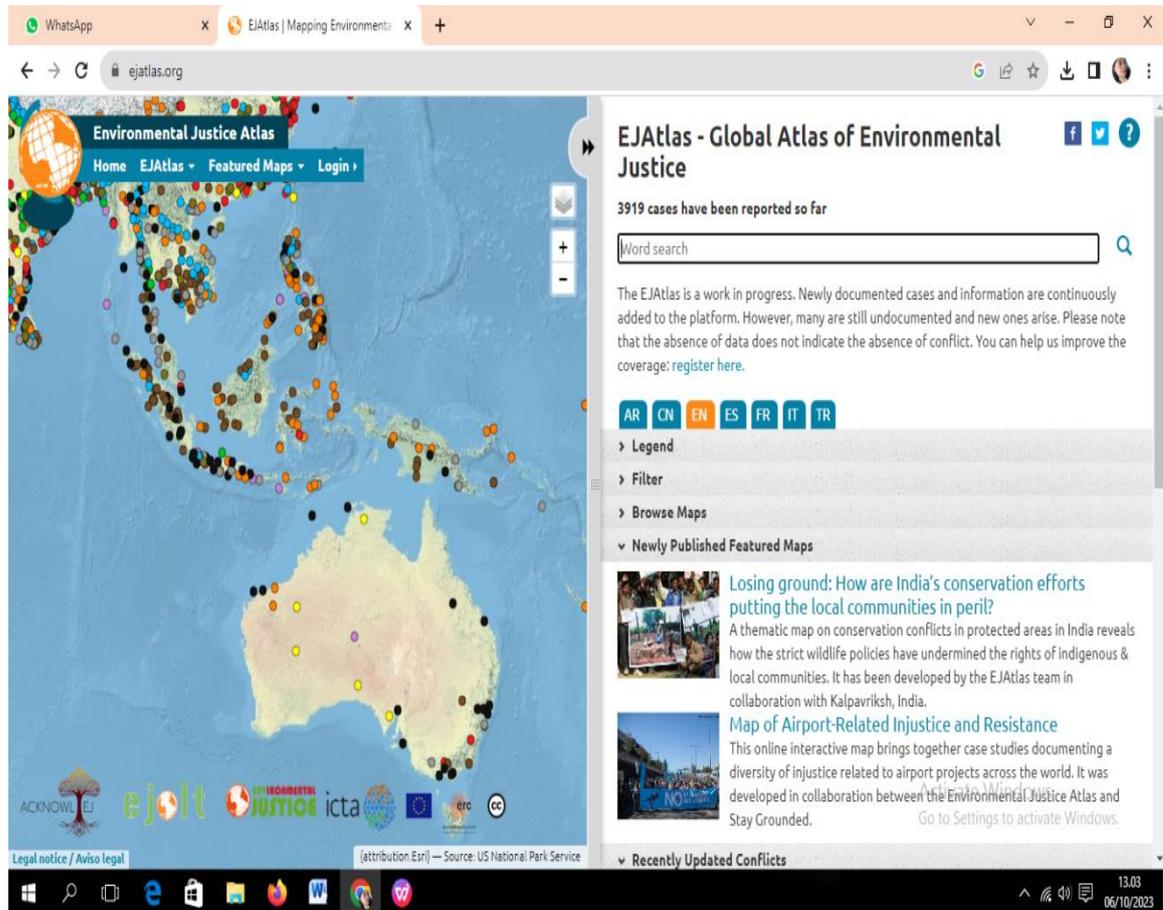
2.5 NGO (*Non Governmental Organisation*) Sebagai Pengawal Pembangunan Di Masyarakat

Di seluruh dunia, masyarakat berupaya untuk mempertahankan tanah, udara, air, hutan, dan mata pencaharian mereka dari proyek-proyek yang merusak dan kegiatan eksploitasi yang memiliki dampak besar terhadap

lingkungan dan sosial: pertambangan, bendungan, penanaman pohon, pengeboran minyak (fracking), pembakaran gas (gas flaring), pembakaran sampah (insinerator), dan lain-lain (Temper, 2018). Ketika sumber daya yang dibutuhkan untuk mendorong perekonomian kita bergerak melalui rantai komoditas mulai dari ekstraksi, pengolahan, dan pembuangan, pada setiap tahap dampak lingkungan dieksternalisasi ke populasi yang paling terpinggirkan. Seringkali hal ini terjadi di luar pengawasan masyarakat atau konsumen (Leah, 2015)

EJAtlas mengumpulkan kisah-kisah masyarakat yang memperjuangkan keadilan lingkungan dari seluruh dunia. Hal ini bertujuan untuk membuat mobilisasi ini lebih terlihat, menyoroti tuntutan dan kesaksian, dan untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan dan negara atas ketidakadilan yang ditimbulkan melalui kegiatan mereka (Del Bene, 2023). Ini juga mencoba untuk berfungsi sebagai ruang virtual bagi mereka yang bekerja pada isu-isu EJAtlas untuk mendapatkan informasi, menemukan kelompok-kelompok lain yang bekerja pada isu-isu terkait, dan meningkatkan kejelasan konflik lingkungan (Atlas, 2021).

Gambar 2. 1 Peta EJAtlas



Sumber: <https://ejatlas.org>

2.6 Gerakan NGO Dalam mengawal isu sosial lingkungan hidup : belajar dari EJAtlas

NGO (*Non Governmental Organisation*) merupakan bentuk partisipasi dan kontribusi aktif dari masyarakat sipil, NGO juga dapat dikatakan sebagai bentuk gerakan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan masyarakat dan lingkungan hidup (Kurniawan, 2012). NGO juga menerima donasi dari orang-orang yang memiliki minat dan keterampilan dalam isu-isu yang mereka pedulikan. Mereka secara terbuka mengundang orang lain untuk peduli pada isu-isu tersebut dan memudahkan mereka yang ingin berdonasi untuk melakukannya. Karena alasan-alasan ini, kegiatan utama LSM

dicirikan oleh layanan sukarela dan pemberian amal (*charitable donation*) (Herdiasnyah, 2016).

Bidang-bidang yang menjadi perhatian NGO berbeda-beda, namun demikian, peran NGO dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis yaitu:

1. Pelaksana

NGO (*Non Governmental Organisation*) dengan peran pelaksana berfokus padapenyediaan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Contoh layanan termasuk perawatan kesehatan atau bantuan tanggap darurat.

2. Katalisator

NGO dengan peran katalisator dapat diidentifikasi dari kemampuannya untuk NGO dalam memelopori pemikiran dan gagasan tentang perubahan sosial. Contoh kegiatan NGO yang berperan sebagai katalisator antara lain advokasi atau kampanye kesetaraan gender. Melalui aksi ini, NGO diharapkan dapat mampu menyadarkan masyarakat akan suatu isu dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

3. Mitra

NGO sebagai mitra, mencerminkan hubungan antara NGO dan masyarakat.

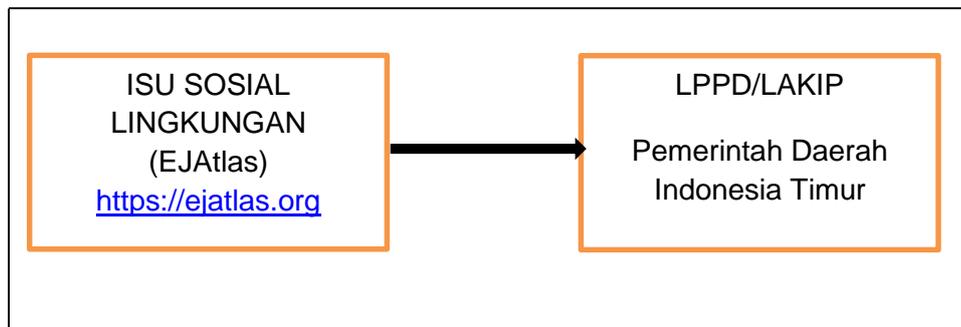
2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Metode	Hasil Penelitian	Keterbatasan & Saran
1.	Shahib, 2017	Deskriptif Kuantitatif	Pemerintah daerah di Indonesia, dalam hal ini pemerintah provinsi telah berfokus untuk menyampaikan akuntabilitas mereka kepada masyarakat.	Keterbatasan: Penelitian ini belum meneliti penggunaan Facebook, Twitter dan Instagram sebagai media resmi lainnya yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai alat akuntabilitas pemerintah daerah Saran: Menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mengungkapkan lebih banyak informasi di situs web resmi mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terutama tentang informasi sosial dan lingkungan
2.	Shahib, 2021	Deskriptif Kuantitatif	Menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi anggaran untuk penanggulangan Covid-19.	
3.	Navarro Galera, 2018	Deskriptif kuantitatif	Modernisasi undang-undang yang memfasilitasi akses warga negara terhadap informasi pemerintah secara khusus berkontribusi terhadap transparansi keberlanjutan pemda.	

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Riset



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi suatu entitas (pemerintah daerah) dalam mengungkapkan dan mempertanggungjawabkan dampak lingkungan sosialnya melalui LPPD/LAKIP yang diunggah di website resmi pemerintah daerah yang mendapatkan konsen publik ini, penelitian ini selanjutnya menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis konten (*content analyst*). Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan hasil analisis penelitian, namun tidak digunakan untuk menarik kesimpulan secara lebih luas (Sugiyono, 2011). Menurut Ningsih dan Cheisvianny (2019) analisis konten (*content analysis*) adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan kata atau konsep tertentu dalam sebuah teks.

Pendekatan dari penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena, gejala, dan kejadian yang terjadi secara fakta (Yuliani, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sebuah masalah dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik subjek yang akan diteliti, maksudnya, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya di deskripsikan untuk mendapatkan kesimpulan yang benar yang akurat (Yulianti, 2020).

Dengan analisis konten, penulis akan menggunakan standar/referensi kriteria 'ada' atau 'tidak adanya' informasi dalam media yang dimiliki oleh organisasi. Dengan cara ini, tergantung pada referensi tertentu, informasi yang tersedia akan mendapatkan skor 1 dan informasi yang tidak tersedia akan

mendapatkan skor 0. (Alcaraz-Quantum, 2012). (Alcaraz-Quiles et al., 2015; Navarro, Ríos, Ruiz, & Tirado, 2014).

Konten analisis ini peneliti mencoba untuk mengembangkan dengan penelitian terdahulu, namun karena konteksnya pemerintah daerah dan hanya fokus membandingkan apa yang di hadirkan diEJAtlas sebagai wakil dari gerakan-gerakan NGO dalam mengawal akuntabilitas isu sosial lingkungan didaerah. Dan peneliti ingin membandingkan laporan-laporan akuntabilitas pemerintah daerah sebagai referensi dari akuntabilitas atau kinerja pemerintah daerah. Maka peneliti membuat 2 indikator usulan yang terinspirasi dari penelitian terdahulu.

Berangkat dari penelitian terdahulu tentang konten analisis yang melihat bahwa acuan itu bisa disesuaikan dengan acuan yang ingin diteliti maka yang peneliti lakukan adalah penyesuaian yang di ilhami dengan *Counter Account*. Setelah menyesuaikan dengan konteks pemerintahan daerah di Indonesia, berikut adalah pedoman indikator analisis konten yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Indikator Akuntabilitas

No.	Indikator
1.	Apakah terdapat LPPD/LAKIP pada website resmi pemerintah daerah?
2.	Apakah permasalahan lingkungan hidup diungkapkan pada LPPD/LAKIP yang diunggah pada website resmi pemerintah daerah?

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, dapat dilihat bahwa pendekatan yang digunakan adalah upaya untuk mengamati praktik akuntabilitas dalam mengungkapkan isu lingkungan hidup melalui website resmi pemerintah daerah.

Kemudian dengan menerapkan metode konten analisis berbasis acuan dari tabel 3.1 diatas, penelitian ini memusatkan perhatian pada keseluruhan website dari pemerintah daerah (9) provinsi dan kabupaten/kota (23) dikawasan Indonesia Timur. Jika informasi yang diacu tersebut tersedia atau diungkapkan dalam website pemerintah daerah maka diberikan nilai 1 dan 0 jika sebaliknya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan mendownload data dari website pemerintah daerah 8 provinsi dan 23 kabupaten/kota pada kawasan Indonesia Timur yang juga menjadi fokus gerakan NGO sosial lingkungan yang ditampilkan dalam EJAtlas.

3.3 Populasi dan Sampel

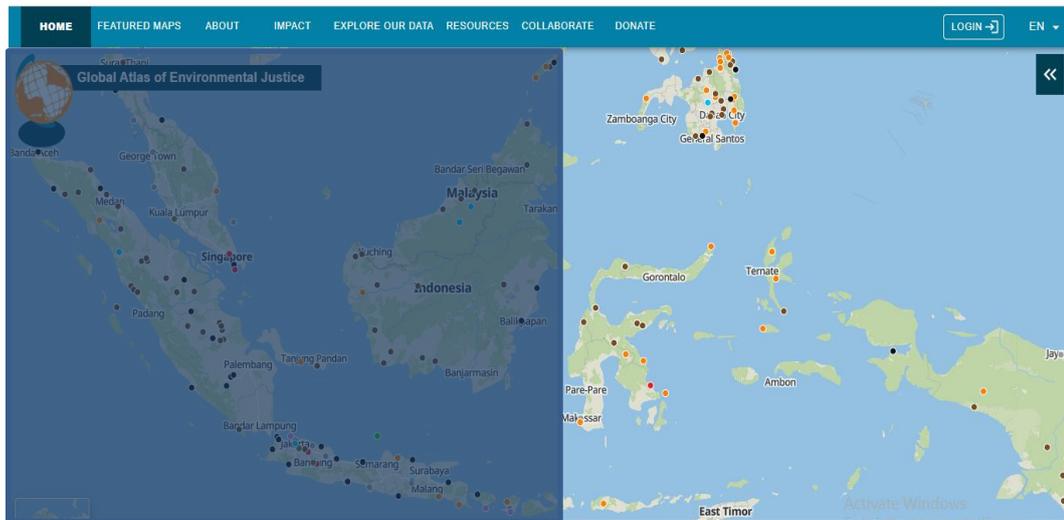
3.3.2 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan yang berkaitan dengan data-data (Margono, 2017). Maka populasi dari penelitian ini adalah website resmi pemerintah kota dan pemerintah kabupaten bagian Indonesia Timur.

3.3.3 Sampel

Yang menjadi fokus EJAtlas di Indonesia Timur .Sampel yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2019). Maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah 8 website resmi pemerintah kota dan 23 website resmi pemerintah kabupaten bagian Indonesia Timur. Pada gambar dibawah ini yang termasuk dalam bagian Indonesia Timur yaitu pada sisi gambar yang berwarna lebih terang. Dimana meliputi daerah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua.

Gambar 3.1 Peta Bagian Indonesia Timur



Sumber : EJAtlas <https://ejatlas.org>

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

3.4.1 Observasi

Observasi menurut Sugiono (2018) adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai karakteristik dibandingkan dengan teknik lainnya. Pengamatan tidak terbatas pada manusia, namun juga pada benda-benda alam lainnya. Dengan observasi, peneliti dapat belajar mengenai perilaku dan maknanya. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti yaitu laporan pemerintah daerah yaitu Laporan Penyelenggaraan Permerintah Daerah (LPPD).

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi kuantitatif melalui pemeriksaan dan analisis dokumen yang dihasilkan oleh individu atau orang lain tentang subjek (Sandewi, 2018)

3.5 Tahapan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu persiapan, tahap proses lapangan dan tahap pelaporan. Dibawah ini adalah penjelasan dari langkah-langkah tersebut :

3.5.1 Tahap Pra-penelitian

Pada tahap pra-penelitian peneliti menentukan objek dan subjek yang akan diteliti dan menyiapkan daftar indikator penilaian dengan bobot tertentu pada setiap indikator.

3.5.2 Tahap Proses Penelitian

Pada tahap proses penelitian ini peneliti mengumpulkan data di website resmi pemerintah daerah yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada proses pengumpulan data ini. Peneliti menggunakan metode observasi dokumentasi dalam bentuk data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)/LAKIP

3.5.3 Tahap Analisis Data

Pada tahap analisis data, peneliti melakukan observasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan indikator-indikator penilaian yang telah disediakan sebelumnya. Selain itu untuk menjaga kualitas data, peneliti senantiasa melakukan re-check dan membandingkan hasil data yang diperoleh dengan acuan yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5.4 Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap terakhir dalam penelitian ini. Pada tahap ini peneliti akan membuat laporan hasil yang akan diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Adapun gambaran singkat tentang pemerintah daerah Indonesia Timur:

4.1.1 Gambaran Umum Indonesia Timur

Indonesia Timur, atau disebut juga Kawasan Timur Indonesia (KTI), adalah sebuah kawasan di bagian timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara (termasuk Bali), Kepulauan Maluku, dan Papua dan kabupaten/kota yang terdiri dari Makassar, Takalar, Pulau Bangka, Buol, Parigi, Morowali Utara, Bahadopi, Iwu Timur, Konawe Kepulauan, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Papua Tengah, Jayapura, Mappi, Tabonji, Uililin, Buleleng, Tanah Awu, Manggarai, Gunung Mutis. Penduduk asli Indonesia Timur umumnya disebut sebagai orang Indonesia Timur. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini pernah tergabung dalam satu provinsi (*gouvernement*) bernama Timur Raya (*Groote Oost*) dengan ibu kota Makassar. Selanjutnya pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), kawasan Indonesia Timur (kecuali Papua) juga menjadi negara bagian bernama Negara Indonesia Timur (1946–1950), yang dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar dari tanggal 7-24 Desember 1946 Susanti (2019).

Pada masa sekarang, Indonesia Timur terdiri dari 17 provinsi, dengan pusat-pusat ekonomi utamanya meliputi Makassar, Denpasar, dan Manado. Dari segi pembangunan, Indonesia Timur lebih tertinggal

dibandingkan Indonesia Barat (Sumatra, Jawa, dan Kalimantan). Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik (BPS), hanya tiga provinsi di Indonesia Timur yang memiliki IPM kategori tinggi yaitu Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Seiring dengan semangat otonomi daerah dan prioritas pembangunan nasional, perekonomian kawasan Indonesia Timur terus bertumbuh.

4.1.2 Gambaran Umum Website Pemerintah Daerah

Penelitian ini mengambil sampel pemerintah daerah yang berada dikawasan Indonesia Timur. Berdasarkan EAtlas kawasan Indonesia Timur memiliki 9 Provinsi dan 23 kabupaten yang memiliki isu sosial. Setiap provinsi dan kabupaten memiliki website resmi. Jadi total sampel yang dianalisis sebanyak 9 provinsi dan 23 kabupaten. Berikut ini daftar provinsi dan kota/kabupaten yang terdapat isu sosial lingkungan berdasarkan EAtlas dikawasan Indonesia Timur

Tabel 4. 1 Daftar Provinsi Di Indonesia Timur Yang Memiliki Isu Sosial Lingkungan

NO.	Provinsi	Website Resmi Pemda
1.	Sulawesi Selatan	https://sulselprov.go.id/
2.	Sulawesi Tengah	https://sultengprov.go.id/
3.	Sulawesi Utara	https://www.sulutprov.go.id/
4.	Sulawesi Tenggara	https://www.sultraprov.go.id/
5.	Maluku Utara	https://www.malutprov.go.id/
6.	Papua Tengah	https://papatengah.net/
7.	Papua	https://papua.go.id/
8.	Bali	https://www.baliprov.go.id/
9.	Nusa Tenggara Timur	https://nttprov.go.id/
10.	Nusa Tenggara Barat	https://www.ntbprov.go.id/

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 4. 2 Daftar Kabupaten Di Indonesia Timur Yang Memiliki Isu Sosial Lingkungan Berdasarkan Ejatlas

No.	Kota/Kabupaten	Website Resmi	Link EJAtlas
1.	Makassar	https://makassarkota.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/reclamation-project-makassar-indonesia
2.	Takalar	https://takalarkab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/takalar-fisherfolk-against-sea-sand-mining
3.	Pulau Bangka, Minahasa Utara	https://www.minutkab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/illegal-iron-ore-mine-on-bangka-island-in-the-coral-triangle-sulawesi-indonesia
4.	Kabupaten Buol	https://buolkab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/buol-district-peoples-struggle-for-their-lands-indonesia
5.	Kabupaten Parigi	https://www.parigimoutongkab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/pt-ampibabo-and-pt-agritoribulu-oil-palm-companies-sulawesi-indonesia
6.	Kabupaten banggai	https://banggaikep.go.id/portal/	https://ejatlas.org/conflict/bukreekit-jaja-population-against-land-grabbing-by-berkat-hutan-pusaka-bhp-oil-palm-company-indonesia
7.	Morowali Utara, Mori Atas	https://www.morowaliutarakab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/pt-spn-oil-palm-company-in-lee-village
8.	Bahadopi, Morowali	https://morowalikab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/indonesia-morowali-industrial-park-imip1
9.	Luwu Timur, Sorowako	https://www.luwutimurkab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/karonsie-dongi-people-and-vale-mine-in-sorowako-sulawesi-indonesia
10.	Konawe Kepulauan, Wawoni	https://www.konawekab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/islammers-resisting-nickel-mining-permits-wawonii-southeast-sulawesi-indonesia
11.	Halmahera Utara	https://halmaherautarakab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/gold-mining-on-indigenous-pagu-territories-in-north-halmahera-indonesia
12.	Weda, Halmahera Tengah	https://haltengkab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/indonesia-weda-bay-industrial-park-iwip-north-maluku-indonesia
13.	Gane Tenggara dan Gane Barat Daya, Halmahera Selatan	https://bappelitbangdahalsel.com/	https://ejatlas.org/conflict/korindos-oil-palm-operations-in-gane-south-halmahera-north-maluku-indonesia
14.	Kawasi, Obi, Kab.Halmahera Selatan	https://bappelitbangdahalsel.com/	https://ejatlas.org/conflict/local-health-threatened-by-nickel-mining-in-obi-island-indonesia

15.	Papua Tengah	https://papatengah.net/	https://ejatlas.org/conflict/amingme-against-freeport-mcmoran-indonesia
16.	Jayapura	https://www.jayapurakota.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/sentani-airport
17.	Kab. Mappi, Boven Digoel	https://portal.mappikab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/korindo-clearing-forests-for-oil-palm-plantations-papua-indonesia
18.	Taboniji, Merauke	https://portal.merauke.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/wilmar-international-sugar-plantations-in-merauke-papua-indonesia
19.	Uliin, Merauke	https://portal.merauke.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/south-korean-conglomerate-posco-daewoo-oil-palm-expansion-indonesia
20.	Desa Celukan Bawang, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng	https://bulelengkab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/celukan-bawang-coal-power-station-north-bali-indonesia
21.	Tanak Awuk, Lombok Tengah	https://lomboktengahkab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/lombok-airport
22.	Manggarai	https://www.manggaraikab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/manganese-mining-in-manggarai-east-nusa-tenggara-indonesia
23.	Gunung Mutis, Timor Barat	http://tskab.go.id/	https://ejatlas.org/conflict/illegal-manganese-mining-in-north-central-timor-indonesia

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat pada dasarnya semua pemerintah daerah yang mengalami permasalahan lingkungan hidup sudah maju, itu ditandai dengan mereka sudah memiliki website-website resmi untuk menjelaskan dan berkomunikasi kepada masyarakat khususnya bagaimana mereka mengelola pembangunan kinerja pemerintahan di tiap wilayah mereka.

Hal ini selaras dengan apa yang telah dibahasakan oleh Shabib (2021), mengungkapkan bahwa “*pemerintah itu adalah entitas atau institusi yang paling wajib bertanggung jawab kepada masyarakat khususnya dalam konteks negara demokrasi karena pemerintah adalah instrumen untuk mendukung kesejahteraan rakyatnya*”.

Maka berdasarkan hal itu karena setelah dilihat bahwa pemerintah sudah memiliki semua informasi dalam konteks website maka menjadi menarik

kemudian untuk dilihat bagaimana ketersediaan laporan akuntabilitas pemerintah daerah.

Berdasarkan sebagaimana yang telah kita ketahui pada dasarnya pemerintah daerah Indonesia Timur sudah maju dalam hal ini memiliki website-website, namun fakta menarik dapat dilihat dari tabel 4.2. kita bisa melihat bahwa ternyata pemerintah daerah di Indonesia Timur khususnya yang menjadi fokus penelitian ini tidak memiliki ketersediaan laporan akuntabilitasnya di website-website pada setiap pemerintah daerah. Fenomena ini menarik karena lantas untuk apa website-website resmi pada setiap pemerintah daerah. Padahal sudah ada aturan yang mewajibkan LPPD dan LAKIP ditampilkan kepada publik. Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 23 nomor 3 tahun 2020 dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 bahwa minimal ringkasan dari LPPD dan LAKIP wajib hadir di website.

Maka peneliti menganggap ini temuan yang menarik dalam konteks Indonesia bahkan dalam konteks isu akuntabilitas disektor pemerintahan. Selanjutnya sudah bisa kita pastikan bahwa isu-isu sosial lingkungan tersebut tidak hadir dalam laporan-laporan sebagaimana pada tabel 4.2.

Tabel 4. 3 Tingkat Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Website

No.	Provinsi	Kota/Kabupaten	Akuntabilitas		Total
			1	2	
1.	Sulawesi Selatan	Makassar	0	0	0
2.	Sulawesi Selatan	Takalar	0	0	0
3.	Sulawesi Selatan	Luwu Timur, sorowako	0	0	0
4.	Sulawesi Utara	Pulau Bangka	0	0	0
5.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Buol	0	0	0
6.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Parigi	0	0	0

7.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai	0	0	0
8.	Sulawesi Tengah	Morowali, Mori Atas	0	0	0
9.	Sulawesi Tengah	Bahadopi, Morowali	0	0	0
10.	Sulawesi Tenggara	Konawe kepulauan	0	0	0
11.	Maluku Utara	Halmahera Utara	0	0	0
12.	Maluku Utara	Halmahera Tengah	0	0	0
13.	Maluku Utara	Halmahera Selatan	0	0	0
14.	Maluku Utara	Kawasi, Obi	0	0	0
15.	Papua Tengah	Papua Tengah	0	0	0
16.	Papua	Jayapura	0	0	0
17.	Papua	Kabupaten Mappi	0	0	0
18.	Papua	Taboniji	0	0	0
19.	Papua	Ulilin, Merauke	0	0	0
20.	Bali	Kabupaten Buleleng	0	0	0
21.	Nusa Tenggara Barat	Tanak Awu, Lombok Tengah	0	0	0
22.	Nusa Tenggara Timur	Manggrai	0	0	0
23.	Nusa Tenggara Timur	Gunung Mutis, Timor Barat	0	0	0

Sumber: Data diolah (2023) berbasis pada tabel 3.1 Indikator Akuntabilitas

Berdasarkan data Tabel 4.3 terlihat jelas bahwa tidak ada pemerintah provinsi yang transparan dan akuntabel dalam mengungkapkan informasi isu sosial dalam LPPD dan LAKIP. Informasi tentang isu sosial lingkungan seakan-akan tidak menjadi sebuah prioritas pemerintah daerah untuk diungkapkan ke masyarakat luas yang tercermin dari rendahnya skor transparansi informasi isu sosial lingkungan dalam LPPD/LAKIP. Hal menariknya adalah Pemprov Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Papua yang paling banyak memiliki isu sosial lingkungan di daerahnya justru tidak akuntabel dan tidak ada pengungkapan dalam LPPD/LAKIP pada website resmi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara keseluruhan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua pemerintah daerah yang menjadi fokus riset ini belum optimal dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengungkapan informasi isu sosial lingkungan yang menjadi konsen publik luas (terlapor dalam Ejabatlas). Hal ini terlihat pada website pemerintah daerah yang tidak memiliki ketersediaan laporan akuntabilitas. Padahal hal ini merupakan suatu kewajiban yang dalam hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 23 nomor 3 tahun 2020 dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 bahwa minimal ringkasan dari LPPD dan LAKIP wajib hadir di website. Untuk mempublikasikan LAKIP dan LPPD kepada masyarakat. Hal ini utamanya menarik dilihat dalam konteks Pemprov Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Papua yang paling banyak memiliki isu sosial lingkungan di daerahnya namun tidak akuntabel dan tidak ada pengungkapan atas LPPD/LAKIP pada website resmi mereka
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah daerahnya telah maju dengan menghadirkan website yang berfokus untuk menyampaikan akuntabilitas mereka kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan kemajuan zaman yang dimana semakin meningkatnya pengguna internet dikalangan masyarakat.

3. Meskipun secara keseluruhan khususnya pemerintah daerah Indonesia Timur memiliki niat yang baik untuk lebih akuntabel dalam situs web resminya, namun mereka masih belum memiliki keinginan yang baik untuk lebih akuntabel dalam tema-tema tertentu seperti tema isu sosial lingkungan. Padahal, hal ini perlu dilaporkan ke masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menambah wawasan tambahan pada literatur yang berkembang terkait dengan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah. Khususnya di era internet seperti sekarang ini, dimana masyarakat telah menjadikan internet sebagai sumber utama dan alat untuk mendapatkan informasi, memberikan saran, dan mengkritik pemerintah. Dengan demikian ada beberapa kontribusi dari penelitian ini yang dapat dipelajari oleh para akademisi, masyarakat, dan pemerintah dimasa depan. Yaitu yang pertama, penelitian ini berkontribusi pada kemajuan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah, khususnya dalam konteks pelaporan pemerintah berbasis situs web pada pemerintah daerah di Indonesia. Kedua, penelitian ini memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi situs web untuk mengembangkan pola akuntabilitas dan transparansi. Ketiga, penelitian ini akan menambah pembahasan mengenai isu-isu sosial-lingkungan dan akuntansi dalam literatur penelitian pemerintahan yang sudah ada.

B. Saran

Penelitian ini memiliki saran untuk para pembuat kebijakan dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama, penelitian ini menyarankan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Indonesia Timur untuk mengungkapkan lebih banyak informasi di situs web mereka sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Terutama informasi sosial dan lingkungan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus kepada pengungkapan berbasis website, sehingga harapan penelitian kedepan bisa menelitinya dari unsur yang lebih kaya, misalnya menggunakan pendekatan wawancara kepada pemerintah daerah kepada masyarakat dan pembacaan narasi laporan. Penelitian ini juga hanya menguji atau mencari dan mengumpulkan data dalam rentan periode 1 Mei – 5 April 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Atlas, E. J., Weber, L., Temper, L., & Del Bene, D. (2021). TRANSFORMING THE MAP?. *Crowdsourcing, Constructing and Collaborating: Methods and Social Impacts of Mapping the World Today*, 21.
- Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan konversi lahan pertanian di bagian negara agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(2), 38-44
- Alcaraz-Quiles, F. J., Navarro-Galera, A., & Ortiz-Rodríguez, D. (2015). Factors determining online sustainability reporting by local governments. *International Review of Administrative Sciences*, 81(1), 79–109.
- Boiral, O. Olivier Boiral,(2013)," Sustainability reports as simulacra? A counter-account of A and A+ GRI reports", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 26 Iss 7 pp. 1036-1071.
- Danayanti, N. (2020). *Pengukuran Tingkat Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Kualitas Website Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Del Bene, D., & Ávila, S. (2023). Critical Mapping for Researching and Acting Upon Environmental Conflicts–The Case of the EJAtlas. In *The Barcelona School of Ecological Economics and Political Ecology: A Companion in Honour of Joan Martinez-Alier* (pp. 195-210). Cham: Springer International Publishing.
- EJAtlas <https://ejatlas.org>
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49-67.
- ICMA. (2021). *Transparent Governance & Anti-Corruption*. ICMA.
<https://icma.org/transparent-governance-anti-corruption>
- Kusriyah, S. (2016). Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 1-11.

- Kurniawan, N. I. (2012). Wacana lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(1), 1-15.
- Laily, F. N. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.
- Leah Temper, Daniela del Bene and Joan Martinez-Alier. 2015. *Memetakan garis depan dan garis depan keadilan lingkungan global: EJAtlas. Jurnal Ekologi Politik* 22: 255-278. <https://journals.librarypublishing.arizona.edu/jpe/article/id/1932/>
- LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH). (2016). Siaran Pers Advokasi Masyarakat Retrieved 20 May, 2016, from <http://lbhmakassar.Org/siaran-pers/>
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Press 2014
- Ningsih, A. T., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility PT. Bukit Asam, Tbk Berdasarkan Global Reporting Initiatives (GRI) dan Kaitannya dengan PROPER. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), Seri A, 846-864.
- Nuh, M. S. (2012). Hakikat pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 50-58.
- Navarro Galera, A., De Los Ríos Berjillos, A., Ruiz Lozano, M., & TiradoValencia, P. (2014). Transparency of sustainability information in local governments: Englishspeaking and Nordic cross-country analysis. *Journal of Cleaner Production*, 64, 495–504. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.038>
- Navarro-Galera, A., & Alcaraz-Quiles, F. J. (2018). The influence of administrative culture on sustainability transparency in European local governments. *Administration & Society*, 50(4), 555-594.
- Palupi, T. (2017, October). Hubungan antara sikap dengan perilaku pro-lingkungan ditinjau dari perspektif theory of planned behavior. In *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning* (Vol. 14, No. 1, pp. 214-217).
- Pina, V., Torres, I., & Royo, S. (2010). Evolusi e-governmentt di Uni Eropa.

- Riadi, Muchlisin. (2020). *Pengungkapan atau Disclosure (Pengertian, Tujuan, Jenis, Tingkatan dan Metode)*, (<https://www.kajianpustaka.com/2020/09/pengungkapan-atau-disclosure.html/>, diakses 9 Februari 2023)
- Susanti, A. F., & Trilaksana, A. (2019). NEGARA INDONESIA TIMUR TAHUN 1946-1950. *Avatara*, 1(3), 592-596.
- Shahib, H. M. (2021). *Towards the Local Government's Integrated Accountability Framework: A Critical Lesson from Socio-Environmental Issues in Indonesia*. Makassar: Springer Nature Singapore
- Shahib, H. M., & Risky, F. R. (2017). Accountability in the Internet Era: A lesson from local governments in Indonesia. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 1(1), 57-74.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan (ketiga)*. BPFE.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono.(2019).*Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi,R&D dan penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Temper, L., Demaria, F., Scheidel, A., Del Bene, D., & Martinez-Alier, J. (2018). The Global Environmental Justice Atlas (EJAtlas): ecological distribution conflicts as forces for sustainability. *Sustainability Science*, 13(3), 573-584.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tentang Penyampaian Petunjuk Penyusunan LPPD Tahun 2020*. Jakarta
- Negara, G. S. (2020). Dampak lingkungan terhadap pencemaran laut di pesisir utara pulau bintang selama musim angin utara. *Jurnal Saintek Maritime*, 20(2), 137-144.
- Niman, E. M. (2019). Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. *Jurnal pendidikan dan kebudayaan Missio*, 11(1), 91-106.
- Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Penerbit NEM. Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1(1), 6-13.

- Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas &Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 61-78.
- Waters-Bayer, A., Kristjanson, P., Wettasinha, C., van Veldhuizen, L., Quiroga, G., Swaans, K., & Douthwaite, B. (2015). Exploring the impact of farmer-led research supported by civil society organisations. *Agriculture & Food Security*, 4, 1-7.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83-91.
- Zulfa, V., Max, M., & Ilyas, I. (2016). Isu-isu kritis lingkungan dan perspektif global. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 5(1), 29-40